

UPAYA INGGRIS DALAM MENJAGA HUBUNGAN PEREKONOMIAN DENGAN INDIA PASCA REFERENDUM BREXIT

Putu Gede Radha Khrisnanta¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, AA Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: kcbradha@yahoo.co.id¹⁾, ratihkumaladewi@unud.ac.id²⁾, aabasuwinu@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Brexit Referendum gives impact to foreign direct investment from India's big companies in United Kingdom that shown their reaction about United Kingdom decision. This research aims to explain any efforts by United Kingdom in order to keep their economic relations with India, especially on investment sector after Brexit Referendum. Those United Kingdom's efforts are materialized into some policies that aims to keep investment from India's companies not decreasing in number after Brexit Referendum. The data in this research was analyzed by using descriptive qualitative methods with secondary data resource and the concept of Economic Statecraft, especially with positive Economic Statecraft's instruments. This research perceives that United Kingdom's efforts that are materialized into government policies aims to keep up the economic relations with India, especially for India's investment in United Kingdom after Brexit Referendum with the application of positive Economic Statecraft's instruments.

Keywords: *Brexit Referendum, economic statecraft, foreign direct investment*

1. PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 2016 yang lalu, Inggris menyelenggarakan referendum mengenai kelanjutan menjadi anggota Uni Eropa. Referendum yang selanjutnya dikenal sebagai Referendum Britain Exit (Brexit) merupakan salah satu peristiwa bersejarah di abad ke-21. Referendum yang diadakan pada 23 Juni 2016 lalu melibatkan kurang lebih 30 juta masyarakat Inggris untuk memilih bertahan atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Tentu saja referendum ini dinilai oleh banyak pihak akan memiliki dampak langsung bagi Inggris, Uni Eropa dan beberapa negara lainnya.

Referendum Brexit pada akhirnya memutuskan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dengan hasil voting sebesar 51,9% masyarakat memilih keluar dan 48,1% memilih tinggal. Beberapa dampak yang dinilai akan menjadi sorotan utama

pasca Referendum Brexit adalah di bidang ekonomi terkait kebijakan perdagangan. Inggris merupakan negara tujuan bagi investor asing untuk memasuki pasar Uni Eropa, dengan adanya Referendum Brexit, para investor tersebut dihadapkan dengan pilihan memindahkan investasi mereka ke negara anggota Uni Eropa yang lain. (Amanda Puspita, 2016)

Menurut data yang dihimpun oleh The Economic Times, pada pertengahan 2017 lalu terdapat empat negara besar yang menjadi investor utama di Inggris. Negara-negara tersebut banyak membuka pabrik dan kantor-kantor bisnis di beberapa tempat di Inggris, salah satunya adalah London. Keempat negara investor terbesar di Inggris tersebut adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Perancis dan India. Dalam periode 2016-2017, Amerika Serikat telah membuka 577 proyek investasi baru, Tiongkok membuka 160 proyek

investasi baru, Perancis membuka 131 proyek investasi baru dan India membuka 127 proyek investasi baru di Inggris.

Dari keempat negara diatas, menarik untuk melihat posisi India sebagai investor terbesar di Inggris yang berasal dari negara berkembang. Selain itu, nilai sejarah Inggris dan India yang mana India yang merupakan salah satu negara persemakmuran Inggris yang merdeka pada 15 Agustus 1947 dan berada di bawah keanggotaan Commonwealth of Nations, menjadi faktor penting yang menarik minat penulis melihat dinamika hubungan Inggris dan India pasca Referendum Brexit.

Dalam kegiatan investasi, adanya Referendum Brexit tentu akan memberikan ketidakpastian bagi para investor asing, utamanya investor yang berasal dari India dan memiliki perusahaan-perusahaan besar di Inggris. Ketidakpastian dari Referendum Brexit tentu akan mempengaruhi mereka untuk memindahkan investasi di Inggris menuju negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya. Economic Times mengeluarkan data bahwa perusahaan-perusahaan asal India yang berinvestasi di Inggris mengalami peningkatan dari 800 perusahaan di tahun 2016 atau sebelum terjadinya Referendum Brexit, menjadi 842 perusahaan di tahun 2019. Peningkatan ini tetap terjadi meskipun tetap adanya isu-isu mengenai ketidakpastian Referendum Brexit.

Peningkatan jumlah investasi dari perusahaan-perusahaan besar India menuju Inggris tidak lepas dari peran serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris, utamanya kebijakan-kebijakan yang

mengarah ke perekonomian dan investasi asing. Kebijakan-kebijakan ini tentu diperlukan agar investasi asing, utamanya yang berasal dari India, setidaknya tetap atau bahkan bisa meningkat jumlahnya dibandingkan dengan sebelum terjadinya Referendum Brexit.

Dari beberapa paparan di atas, dapat dilihat bahwa India merupakan salah satu negara yang dianggap penting bagi Inggris, utamanya dari sektor perekonomian. Terlihat pula anomali yang terjadi saat investasi perusahaan-perusahaan besar India menuju Inggris justru malah bertambah dibandingkan saat sebelum terjadinya Referendum Brexit. Menarik untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Inggris dalam menjaga hubungan perekonomian, dalam hal ini menjaga giat investasi asing India yang berada di Inggris, pasca terjadinya Referendum Brexit.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua tulisan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yakni mengenai upaya Inggris untuk menjaga hubungan perekonomian dengan India pasca Referendum Brexit. Tulisan pertama yang dapat digunakan sebagai acuan tulisan ini ialah paper milik Ana Cristina Alves, seorang asisten professor di *School of Human and Social Science*, Universitas Nanyang, Singapura. Paper ini memiliki judul "*Building Soft Power: China's Positive Economic Statecraft in Africa- Historical Comparisons*". Paper ini merupakan sebuah penelitian yang menganalisa mengenai pinjaman sumber daya pembangunan infrastruktur yang

diberikan oleh Tiongkok kepada pemerintah di beberapa negara benua Afrika. Penelitian ini juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari instrumen *positive economic statecraft* yang dijalankan oleh Tiongkok kepada pemerintah di beberapa negara tersebut.

Pinjaman sumber daya pembangunan infrastruktur menjadi hal yang semakin banyak terjadi seiring pertumbuhan hubungan yang semakin baik antara Tiongkok dengan beberapa negara di benua Afrika. Pinjaman ini digunakan oleh pemerintah Tiongkok sebagai salah satu cara untuk membuka gerbang bagi perusahaan-perusahaan infrastruktur besar asal Tiongkok untuk masuk ke negara-negara benua Afrika. Sedikit yang mengetahui bahwa pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok kepada negara-negara benua Afrika sesungguhnya telah dilakukan dari jangka waktu yang cukup lama, tepatnya sejak tahun 1950an.

Pada awalnya, dalam sudut pandang ekonomi, pinjaman sumber daya pembangunan infrastruktur dari Tiongkok kepada pemerintah negara-negara benua Afrika pada tahun 1950an hingga 1990an telah mengakomodir tujuan kebijakan luar negeri Tiongkok saat itu, sebut saja seperti menarik perhatian dunia internasional dan mendapatkan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun pinjaman yang menjadi kebijakan instrumen *positive economic statecraft* ini menimbulkan banyak kontroversi, baik dalam situasi domestik Tiongkok maupun beberapa negara di dunia internasional, negara-negara di benua Afrika selalu menyambut hangat kehadiran Tiongkok yang sangat membantu

pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara tersebut.

Setelah dekade awal dari kebijakan tersebut dan tujuan dari kebijakan luar negeri Tiongkok telah berhasil dicapai, terjadi perubahan arah dan tujuan kebijakan luar negeri yang diinginkan oleh pemerintah Tiongkok. Pinjaman sumber daya pembangunan infrastruktur tidak lagi menjadi cara bagi Tiongkok untuk mendapat pengakuan dunia internasional, namun telah bergeser menjadi keinginan untuk membuka gerbang pasar bagi perusahaan-perusahaan Infrastruktur asal Tiongkok, penyediaan sumber daya pembangunan infrastruktur jangka panjang dan kepemilikan aset luar negeri, dalam hal ini di negara-negara Benua Afrika. Meskipun kebijakan Tiongkok ini masih kalah bersaing dalam hal teknologi dan ketenaga-ahlian dibanding negara-negara maju benua Eropa atau Amerika Serikat, hadirnya perusahaan-perusahaan infrastruktur asal Tiongkok ke negara-negara benua Afrika tetap menguntungkan Tiongkok di sektor perekonomian.

Sejauh ini, penggunaan instrumen *positive economic statecraft* yang dilakukan oleh Tiongkok dalam bentuk pinjaman sumber daya pembangunan infrastruktur di negara-negara benua Afrika dapat dikatakan berhasil. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur asal Tiongkok telah berhasil memasuki dan membuka proyek operasi di pasar permintaan negara-negara benua Afrika, utamanya perusahaan infrastruktur di bidang konstruksi dan industri pendukung pembangunan.

Manfaat yang penulis dapat ambil dari paper di atas adalah terlihat realisasi salah

satu konsep yang dapat membantu menyelesaikan tulisan ini. Konsep tersebut adalah konsep *Economic Statecraft*, utamanya instrumen-instrumen *positive economic statecraft*. Dalam kasus di atas, Tiongkok menggunakan instrumen *positive economic statecraft* yang dituangkan dalam kebijakan pinjaman sumber daya pembangunan infrastruktur kepada negara-negara benua Afrika. Pada awalnya, kebijakan ini digunakan oleh Tiongkok untuk menarik perhatian dunia internasional akan eksistensi Tiongkok dan sebagai usaha mendapatkan keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, seiring perkembangan waktu, tujuan kebijakan ini berubah menuju keinginan Tiongkok untuk membuka gerbang bagi perusahaan-perusahaan infrastruktur asal Tiongkok untuk masuk ke pasar permintaan negara-negara benua Afrika. Perbedaan antara paper di atas dengan tulisan ini adalah aktor paper di atas merupakan Tiongkok dan negara-negara benua Afrika, sedangkan aktor dari tulisan ini adalah Inggris dan India.

Tulisan kedua yang dapat digunakan sebagai acuan tulisan ini ialah tesis yang merupakan hasil penelitian dari Toton Hartanto, mahasiswa S2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, yang berjudul "*Container Security Initiative sebagai Economic Statecraft dalam Global War on Terrorism Amerika Serikat*". Tulisan ini membahas tentang kebijakan *Container Security Initiative* yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat, untuk memberikan sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi tentu tidak akan secara langsung dapat menghalangi aksi terorisme,

namun sanksi ekonomi yang diberikan kepada negara-negara pendukung kelompok terorisme akan membuat mereka berpikir ulang untuk memperluas dukungan mereka terhadap kelompok terorisme.

Serangan terorisme terhadap Amerika Serikat yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 telah menjadi sebuah simbol akan adanya gerakan terorisme tipe baru. Serangan ini tentu membawa implikasi terhadap perspektif keamanan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyikapi serangan ini lalu mengeluarkan resolusi DK PBB Nomor 1373 Tahun 2001 yang memuat keharusan (*mandatory obligation*) kepada setiap negara untuk melakukan tindakan yang serius dalam hal memerangi terorisme. Hal ini menjadi penting karena gerakan dari setiap kelompok terorisme di seluruh dunia akan menjadi ancaman bersama.

Amerika Serikat yang menjadi korban serangan kelompok terorisme kala itu juga mengambil kebijakan yang penting guna melindungi stabilitas keamanan negaranya. Singh (2006) menjelaskan bahwa serangan kelompok terorisme pada 11 September 2001 menjadi pemicu kemunculan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sangat terkenal mengenai *War on terrorism*, kebijakan tersebut selanjutnya dikenal sebagai *The Bush Doctrine*. Doktrin tersebut memuat tentang *preventive war*, kontrol terhadap *weapon of mass destruction* dan perang terhadap terorisme. Salah satu hasil dari kebijakan *The Bush Doctrine* adalah kebijakan *Container Security Initiative*.

Container Security Initiative adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat pada Januari

2002 yang merupakan kebijakan ekonomi luar negeri Amerika Serikat untuk tujuan keamanan nasional. Objek dari kebijakan ini tentu saja adalah seluruh peti kemas yang masuk ke Amerika Serikat. Saat ini hampir 90% dari kegiatan perdagangan internasional menggunakan peti kemas (*container*). Kurang lebih 7 juta peti kemas yang masuk ke Amerika Serikat akan dibongkar di berbagai pelabuhan di Amerika Serikat guna memastikan barang yang masuk tersebut aman.

Dalam penerapan kebijakan *Container Security Initiative* tentu akan memberikan dampak-dampak lainnya, salah satunya adalah peningkatan biaya tambahan dan keterlambatan pengiriman barang yang dialami langsung oleh para negara eksportir yang mengirim barang melalui peti kemas menuju Amerika Serikat. Dalam hal ini, *Container Security Initiative* secara tidak langsung menjadi bentuk *trade barrier* baru. Sehingga negara-negara dengan *weak power* dalam hal keuangan akan merasakan peningkatan biaya tersebut. Tentu negara-negara yang dimaksud adalah negara-negara yang dirasa sebagai pendukung kelompok terorisme oleh Amerika Serikat, seperti Kuba, Iran, Irak, Libya, Korea Utara, Sudan dan Suriah.

Selain kebijakan *Container Security Initiative* sebagai *Economic Statecraft* dari Amerika Serikat yang merupakan sanksi ekonomi terhadap negara-negara pendukung kelompok terorisme, diberlakukan juga instrumen-instrumen *negative Economic Statecraft* kepada Kuba, Iran, Irak, Libya, Korea Utara, Sudan dan Suriah. Sanksi-sanksi ekonomi tersebut antara lain

pembatasan ekspor, embargo senjata, larangan bantuan luar negeri, membatasi atau melarang impor barang dan jasa dari negara-negara tersebut, larangan melakukan transaksi keuangan dengan negara-negara tersebut dan tidak memperoleh pinjaman atau bantuan keuangan dari badan internasional.

Manfaat yang dapat penulis ambil dari tesis di atas adalah contoh terealisasinya salah satu konsep yang dapat digunakan dalam tulisan ini, yakni konsep *Economic Statecraft*. Konsep ini terlihat saat pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan *Container Security Initiative* untuk memberikan sanksi bagi negara-negara yang dianggap sebagai pendukung kelompok terorisme, seperti Kuba, Iran, Irak, Libya, Korea Utara, Sudan dan Suriah. *Container Security Initiative* menghasilkan bentuk *trade barrier* baru yang meningkatkan biaya dari negara eksportir. Tujuan dari upaya tersebut adalah agar negara-negara pendukung kelompok terorisme yang dianggap sebagai negara yang memiliki *weak power* dalam bidang perekonomian berpikir ulang melanjutkan dukungan mereka terhadap kelompok terorisme.

Selain *Container Security Initiative*, dikeluarkan juga bermacam sanksi-sanksi ekonomi seperti lain pembatasan ekspor dan membatasi atau melarang impor barang dan jasa sebagai bentuk dari *negative Economic Statecraft*. Persamaan antara tesis di atas dan tulisan ini adalah keduanya sama-sama menggunakan konsep *Economic Statecraft*, namun perbedaannya adalah dalam tesis di atas dijelaskan bentuk dan penerapan *negative Economic Statecraft*, sedangkan dalam tulisan ini akan melihat juga instrument

lain dari *Economic Statecraft*, yakni *positive Economic Statecraft*.

Dari kedua kajian pustaka diatas, terdapat konsep yang dapat membantu penulis membahas upaya-upaya yang dilakukan Inggris demi mempertahankan hubungan perekonomian dengan India pasca Referendum Brexit. Konsep tersebut adalah konsep *Economic Statecraft*, utamanya instrumen *positive economic statecraft* yang akan menggambarkan upaya-upaya nyata yang dilakukan Inggris guna mempertahankan hubungan perekonomian dengan India pasca terjadinya Referendum Brexit.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Lokus dalam penelitian ini adalah mulai tahun 2016 hingga saat ini. Tahun 2016 dapat menjelaskan terjadinya Referendum Brexit hingga data yang didapat saat ini yakni terlihatnya upaya yang dilakukan oleh Inggris dalam menjaga hubungan perekonomian dengan India pasca Referendum Brexit. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dapat berupa dokumentasi dan penelitian yang terdahulu seperti buku, jurnal mengenai Brexit, situs pemerintah dan artikel berita yang memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan Inggris dalam menjaga hubungan perekonomian dengan India pasca Referendum Brexit.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Referendum Britain Exit (Brexit) adalah sebuah referendum yang dilakukan oleh

Inggris, untuk memutuskan kelanjutan Inggris menjadi negara anggota Uni Eropa atau keluar dari Uni Eropa. Referendum Brexit pada awalnya merupakan sebuah janji politik yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Inggris, David Cameron, jika dia bisa terpilih kembali pada pemilu yang dilaksanakan tahun 2015. Janji ini lahir dari berbagai macam desakan yang dikeluarkan oleh partai pendukung David Cameron yakni Partai Konservatif dan partai sayap kanan anti imigrasi Inggris, UKIP (Denny Armandhanu, 2016). Desakan tersebut berisi pernyataan bahwa rakyat Inggris tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi melalui referendum sejak tahun 1975. Dasar hukum dari penyelenggaraan referendum Brexit ini telah ditetapkan oleh Parlemen Inggris dan tercantum dalam Undang-Undang Referendum Uni Eropa 2015.

Referendum Brexit akhirnya terjadi dan menetapkan hari pemungutan suara pada hari Kamis, 23 Juni 2016. Hampir 30 juta masyarakat Inggris yang berusia diatas 18 tahun dapat memberikan suara “ya” atau “tidak” terkait kelanjutan Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa. Kubu yang memenangkan lebih dari setengah suara akan memenangkan referendum. Pemungutan suara dalam Referendum Brexit dilakukan dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam waktu setempat. Terdapat 41.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 382 daerah pemilihan. Di setiap tempat pemungutan suara dibatasi hanya untuk 2500 pemilih. Hasil dari Referendum Brexit pada akhirnya memutuskan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dengan hasil voting sebesar 17.410.742 (51,9%) masyarakat

memilih keluar dan 16.141.241 (48,1%) masyarakat memilih tinggal.

Dalam bidang politik, jauh sebelum terjadinya Referendum Brexit, masyarakat di Inggris telah terbelah ke dalam dua kubu yakni kubu pendukung keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dan kubu yang mendukung Inggris tetap menjadi bagian dari Uni Eropa. Sedangkan di bidang ekonomi, nilai mata uang Poundsterling langsung jatuh pada posisi terendah sejak 1985 sesaat setelah *British Broadcasting Corp* memprediksi kemenangan kubu para pemilih yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Nilai tukar Poundsterling anjlok lebih dari 10 persen. Jatuhnya nilai tukar Poundsterling ini juga memberikan dampak secara langsung bagi jatuhnya indeks saham dan bank. Diprediksi bahwa jatuhnya nilai tukar Poundsterling merupakan reaksi pasar yang bergejolak akibat dari hasil yang dikeluarkan oleh Referendum Brexit pada 23 Juni 2016.

Hambatan bagi Investasi Asing di Inggris pasca Referendum Brexit

Keputusan mayoritas masyarakat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa yang diwujudkan dalam Referendum Brexit pada 23 Juni 2016 memberikan ketidakpastian terhadap prospek ekonomi bagi investor-investor yang berada di Inggris. Inggris merupakan negara tujuan bagi investor asing untuk memasuki pasar Uni Eropa, dengan adanya Referendum Brexit, para investor tersebut dihadapkan dengan pilihan memindahkan investasi mereka ke negara anggota Uni Eropa yang lain. Keberadaan investor-investor asing di Inggris selain untuk

mempermudah jalur distribusi barang, juga sebagai gerbang penjualan menuju pasar permintaan Uni Eropa. Pasca Referendum Brexit, gerbang menuju pasar Uni Eropa juga otomatis akan tertutup dan menyebabkan tekanan jangka pendek bagi investasi-investasi asing tersebut, selain itu nilai mata uang Poundsterling yang turun hingga 20% juga berdampak pada meruginya investasi-investasi asing yang berada di Inggris.

Selain menjadikan Inggris sebagai gerbang menuju pasar Uni Eropa, beberapa perusahaan asing besar di Inggris juga memperoleh komponen bisnisnya dari Uni Eropa. Contohnya Toyota, perusahaan otomotif raksasa yang berasal dari Jepang. Pabrik Toyota yang berada di Derby mengandalkan suplai komponen dari negara-negara anggota Uni Eropa. Pabrik tersebut merencanakan untuk berhenti apabila tidak ada perjanjian lanjutan yang ditawarkan Inggris pasca terjadinya Referendum Brexit.

Dalam hal giat investasi, Inggris merupakan negara terbesar sebagai tujuan penanaman modal asing negara-negara yang ingin memasuki Uni Eropa. Pernyataan ini didukung dengan data yang dikeluarkan oleh UNCTAD, dengan nilai rata-rata mencapai USD 56 Miliar per tahun pada periode 2010 hingga 2014. Sekitar 72% dari para investor tersebut pada 2015 lalu menyatakan bahwa Inggris sangat diminati karena dianggap sebagai akses utama memasuki pasar tunggal Uni Eropa. Dengan adanya Referendum Brexit, diperkirakan para investor akan mencari akses dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya yang tentu akan menguntungkan negara-negara tujuan baru tersebut.

Investasi India yang berada di Inggris

. Menurut laporan Bank Dunia, pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi India berada pada level 7,42%, mengalahkan Tiongkok yang hanya 7,35%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini tentu juga menjadi faktor akan berkembangnya investasi-investasi India yang ditanamkan di beberapa negara lainnya. Pertumbuhan perekonomian India tak hanya ditunjukkan melalui data statistik Bank Dunia, namun juga dibuktikan dalam grafik yang dikeluarkan oleh *International Monetary Fund* (IMF). Menurut grafik IMF, GDP India masih berada di atas negara-negara lainnya. Data tahun 2018 dan 2019 menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4% dan 7,8%, jauh di atas Tiongkok yang berada di titik 6,6% dan 6,4%. Hal ini menjadikan India sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dibandingkan dengan *emerging countries* yang lainnya. Pertumbuhan perekonomian India yang terlihat dari grafik GDP di atas juga jauh berada di atas negara sebesar Amerika Serikat yang hanya berada pada kisaran 2,5% pada tahun 2019. Selain itu, kuatnya GDP India juga melebihi negara-negara anggota Uni Eropa yang hanya mampu berada di poin 2% pada 2019, turun 0,2% dari 2018 dan 0,4% dari 2017.

Dengan dukungan kekuatan pertumbuhan perekonomian yang mumpuni, sektor investasi modal juga mengalami perkembangan di India. Seperti yang disebutkan di atas bahwa pemerintah India mendorong kebijakan perekonomian yang mampu membawa perubahan ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan memicu tumbuhnya investasi. Selain investasi dalam

negeri yang terus tumbuh, investasi luar negeri pun mengalami peningkatan serupa. Investasi India di luar negeri mulai mengalami pertumbuhan seiring terjadinya pertumbuhan perekonomian India. Salah satu negara yang memiliki nilai historis dengan India dan juga menjadi negara tujuan investasi perusahaan-perusahaan besar dari India adalah Inggris.

India merupakan salah satu dari empat negara yang memiliki investasi terbesar di Inggris. Bagi Inggris, India merupakan mitra kerjasama ekonomi yang dianggap memiliki prospek kemajuan ekonomi sangat pesat dibanding negara lainnya (*UK-India Business Council*, 2016). Inggris melihat bahwa laju pertumbuhan perekonomian India sangat menjanjikan apabila dapat disandingkan dengan kerjasama di sektor perekonomian dengan Inggris. Pengaruh kerjasama kedua negara ini tidak lepas dari nilai historis dan kepentingan nasional mereka, utamanya dengan hal yang terkait dengan sektor ekonomi.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh India hingga saat ini, tentu juga mempengaruhi perkembangan investasi India di luar negeri, salah satunya adalah investasi India di Inggris. Pada tahun 2014 lalu, investasi dari India menuju Inggris meningkat hingga 64% dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan Inggris hampir setara dengan Perancis, yang pada saat itu merupakan negara dengan investasi terbesar kedua di Inggris. Menurut data dari UKTI (*UK Trade and Investment*), pada tahun 2015 India membuka sekitar 122 proyek investasi di Inggris dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 7900 karyawan.

Hingga sebelum terjadinya Referendum Brexit, terdapat sekitar 800 perusahaan yang berasal dari India datang dan melakukan investasi di Inggris, dengan modal investasi mencapai US\$ 5,95 miliar serta menghasilkan perputaran pendapatan hingga US\$ 66,5 miliar. Pada tahun 2016-2017, India masuk sebagai tiga besar negara yang melakukan investasi terbanyak di Inggris, dengan melakukan investasi hampir mencapai US\$ 18,2 miliar. (Rohini Singh, 2018)

Pertumbuhan dan laju investasi India di Inggris dapat dikatakan cepat dan membantu roda perekonomian Inggris. Hingga saat sebelum Referendum Brexit, terdapat sekitar 800 perusahaan yang berasal dari India di Inggris yang telah memiliki karyawan dengan total mencapai lebih dari 110.000 jiwa. Beberapa perusahaan besar tersebut seperti Tata Motors, Infosys, Wipro, Tata Global Beverages dan Tata Steel memiliki giat usaha yang amat besar di Inggris.

Keadaan Investasi India yang berada di Inggris pasca Referendum Brexit

Pasca Referendum Brexit, gerbang menuju pasar Uni Eropa yang menjadi salah satu tujuan perusahaan-perusahaan India di Inggris juga otomatis akan tertutup dan menyebabkan tekanan jangka pendek bagi perusahaan India di Inggris, selain itu nilai mata uang Poundsterling turun hingga 20% dan berada pada titik terendah selama 30 tahun terakhir berdampak pada meruginya perusahaan-perusahaan besar India yang berada di Inggris. Tekanan serta kerugian yang dialami perusahaan-perusahaan besar India yang berada di Inggris tentu juga mengancam keberlangsungan kegiatan usaha

mereka. Pabrik-pabrik yang mengalami kerugian cukup besar akan dihadapkan dengan pilihan memberhentikan karyawan dalam jumlah besar, atau menutup operasional pabrik tersebut. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak, India sebagai investor akan kehilangan operasional pabrik sedangkan Inggris akan kehilangan banyak lapangan pekerjaan.

Munculnya isu-isu serta ketidakpastian pasca terjadinya Referendum Brexit tentu menghambat bisnis tersebut. Beberapa perusahaan telekomunikasi asal India bahkan mulai mempersiapkan diri agar bisa memiliki lahan operasi di kedua tempat, baik di Inggris dan juga negara-negara anggota Uni Eropa, tentu dengan modal yang cukup besar (Rohini Singh, 2018). Persiapan diri ini wajib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi tersebut agar kegiatan operasional perusahaan tidak terganggu dan merugikan perusahaan itu sendiri.

Terganggunya operasional perusahaan-perusahaan besar asal India di Inggris tentu memerlukan solusi serta kebijakan yang tepat, cepat dan akurat. Apabila kebijakan serta solusi tak kunjung datang, perlahan namun pasti, perusahaan-perusahaan tersebut akan menemui kendala serta kerugian yang memaksa mereka untuk memberhentikan karyawan atau menutup beberapa kantor cabang dari usaha mereka. Hal ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi keadaan perekonomian domestik Inggris, serta mempengaruhi jumlah investasi yang datang dari India menuju Inggris.

Upaya Penurunan Pajak oleh Inggris dengan *Super-Competitive Economy*

Referendum Brexit yang tidak hanya mempengaruhi keadaan ekonomi dan politik dari Inggris dan negara-negara anggota Uni Eropa, melainkan juga mempengaruhi giat investasi dari perusahaan-perusahaan asing di Inggris, tentu membutuhkan sebuah kebijakan yang mampu menjawab segala kebingungan yang terjadi pasca keluarnya hasil Referendum Brexit. Segala isu-isu perekonomian dalam investasi-investasi asing di Inggris akan dapat ditanggulangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah ke sektor perekonomian secara langsung. Dalam hal ini, proses perumusan dan keluarnya kebijakan dapat dijawab dengan konsep *Economic Statecraft*.

Konsep *Economic Statecraft* merupakan sebuah konsep yang menjelaskan kemampuan sebuah negara untuk mempengaruhi negara lain dengan kekuatan atau *power* yang bersumber dari aspek-aspek ekonomi. Terdapat dua jenis dari *Economic Statecraft*, yakni *positive Economic Statecraft* dan *negative Economic Statecraft*. *Positive Economic Statecraft* memiliki artian usaha sebuah negara untuk menggiring negara lain bergerak sesuai dengan keinginannya dengan pemberian hadiah atau *rewards*. Sedangkan *negative Economic Statecraft* merupakan usaha sebuah negara memberikan hukuman kepada negara lain yang bergerak ke arah yang tidak mereka inginkan.

Instrumen *Economic Statecraft* yang termasuk dalam hadiah atau *rewards* dan dapat digunakan dalam kondisi Inggris pasca Referendum Brexit, yakni menjaga investasi

yang berasal dari India agar setidaknya tetap, atau lebih baiknya bertambah dapat berupa:

1. Mempermudah pemberian izin investasi melalui kantor pelayanan satu pintu.
2. Subsidi atau penurunan tarif yang diberlakukan untuk produk-produk tertentu.
3. Pemberlakuan peraturan mengenai pajak yang ringan dan melalui proses yang tidak berbelit-belit.
4. Pemberian kepastian hukum atau garansi terhadap setiap investasi yang datang.

Inggris yang menyadari akan dampak yang diberikan oleh hasil dari Referendum Brexit pada 23 Juni 2016 yang lalu segera merumuskan beberapa kebijakan perekonomian yang diharapkan mampu menjaga investasi-investasi perusahaan asing yang berada di Inggris. Pada bulan Juli 2016, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan *Financial Times*, Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, menyatakan bahwa Inggris akan segera mengeluarkan kebijakan *Super-Competitive Economy* yang akan menjawab keresahan dan kebingungan perusahaan-perusahaan asing di Inggris pasca Referendum Brexit untuk sementara waktu.

Kebijakan *Super-Competitive Economy*, dijelaskan secara lebih lanjut oleh Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, merupakan sebuah kebijakan yang akan memotong pajak-pajak perusahaan asing di Inggris menjadi kurang dari 15%, dari angka pajak 20% sebelum terjadinya Referendum Brexit. Hal ini akan menjadikan Inggris sebagai negara dengan pajak perusahaan asing terendah di seluruh dunia.

Kebijakan *Super-Competitive Economy* ini juga didukung oleh kunjungan Perdana Menteri Inggris, Theresa May ke India pada November 2016 lalu. Kunjungan Theresa May menuju India ini merupakan kunjungan bilateral pertama beliau di luar benua Eropa sejak menjabat menjadi Perdana Menteri Inggris pada Juli 2016. Dalam kunjungan ini, Theresa May bertemu dengan delegasi pengusaha di India, utamanya para pengusaha yang memiliki investasi di Inggris, serta bertemu dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi (VOA Indonesia, 2016). Kunjungan Theresa May dilihat oleh berbagai pihak sebagai tanda bahwa Inggris akan mempererat hubungan perekonomian dengan India sebagai negara yang mengalami pertumbuhan perekonomian paling cepat di dunia.

“That is why I’ve made my first trade mission, and first bilateral visit outside Europe, to India. Because more trade, more investment and fewer barriers to doing business in our 2 countries will make us all more prosperous, peaceful and secure. And within this unique partnership there is so much potential for us to advance those things.” Kutipan pidato Theresa May di India tersebut menyiratkan bahwa pasca Referendum Brexit, Inggris dan India akan melakukan hubungan dagang dan kerjasama ekonomi yang lebih erat. Dengan memperkecil aturan-aturan yang selama ini dinilai menghambat, Inggris berharap akan terjadi perdagangan serta investasi yang lebih banyak datang dari India. Tentu saja, kebijakan *Super-Competitive Economy* menjadi salah satu kebijakan andalan Inggris

guna mempertahankan atau menambah jumlah investasi India yang berada di Inggris.

Kembali melihat pada konsep *Economic Statecraft*, pemberlakuan kebijakan *Super-Competitive Economy* dari pemerintah Inggris dan merupakan sebuah kebijakan yang akan memotong pajak-pajak perusahaan asing di Inggris menjadi kurang dari 15%, dari angka pajak 20% sebelum terjadinya Referendum Brexit, merupakan realisasi dari instrumen *Positive Economic Statecraft*, poin ketiga yaitu pemberlakuan peraturan mengenai pajak yang ringan dan melalui proses yang tidak berbelit-belit.

Kota London sebagai Tujuan Utama Investasi Asing

Selain mengeluarkan kebijakan *Super-Competitive Economy*, pemerintah Inggris juga kembali menggalakan pesona kota London sebagai destinasi utama bagi perusahaan-perusahaan besar yang ingin berinvestasi di Inggris. Dengan tajuk utama *“Welcome to London-Europe’s Global Business City”* menunjukkan bahwa kota London menawarkan kesempatan terbaik bagi investasi-investasi asing yang ingin meraih kesuksesan dalam ranah internasional. Dilansir dari *London & Partners*, kota London menawarkan lima hal yang dipercaya mampu menjadi faktor penarik investasi-investasi asing. Kelima hal tersebut adalah:

1. *World Class Talent*

Menawarkan pilihan tenaga kerja dengan jumlah lebih dari 4 juta jiwa, dengan kemampuan berbicara multi-bahasa dan kemampuan di beberapa bidang professional.

2. *First Choice for Headquarters*

Menawarkan kota London sebagai pilihan pertama bagi perusahaan-perusahaan besar yang datang dari negara lain dalam membuka markas besar bisnis mereka.

3. *Business-friendly Environment*

Menawarkan kota London sebagai kota dengan akses paling mudah untuk memulai bisnis di benua Eropa, dengan beberapa keuntungan dimulai dari aturan ketenagakerjaan yang fleksibel, pemberian izin usaha yang mudah, visa bagi para wirausaha dan rendahnya pajak usaha.

4. *Access to Customers*

Menawarkan akses bagi lebih dari 8 juta warga kota London sebagai pelanggan bisnis.

5. *Investment and Innovation*

Menawarkan keamanan berinvestasi dengan bantuan beberapa lembaga investasi serta lembaga bantuan hukum terkait.

Terkait kembali dengan konsep *Economic Statecraft*, utamanya instrumen-instrumen *Positive Economic Statecraft* yang dapat dijalankan oleh pemerintah Inggris guna mempertahankan, atau bahkan menambah jumlah investasi India di Inggris pasca Referendum Brexit, dapat tercermin dari kebijakan menjadikan London sebagai kota tujuan investasi asing. *Business-friendly Environment* mengimplementasikan instrumen mempermudah pemberian izin investasi, sedangkan *Investment and Innovation* mengimplementasikan instrumen pemberian kepastian hukum atau garansi terhadap setiap investasi yang datang. Dengan beberapa kemudahan dalam implementasi instrumen-instrumen *Positive*

Economic Statecraft yang ada dalam kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris, tentu dapat menjamin keberadaan investasi-investasi dari India agar tetap, atau malah semakin banyak berada di Inggris.

Hasil dari Upaya Inggris dalam menjaga Hubungan Perekonomian dengan India pasca Referendum Brexit

Pasca terjadinya Referendum Brexit dan setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah Inggris mengenai *Super-Competitive Economy* dan menjadikan kota London sebagai kota tujuan investasi asing yang utama di benua Eropa, terjadi peningkatan yang ditunjukkan dari jumlah investasi-investasi yang datang dari perusahaan-perusahaan besar asal India menuju Inggris. *Economic Times* mengeluarkan data bahwa perusahaan-perusahaan asal India yang berinvestasi di Inggris mengalami peningkatan dari 800 perusahaan di tahun 2016 menjadi 842 perusahaan di tahun 2019. Peningkatan ini tetap terjadi meskipun tetap adanya isu-isu mengenai ketidakpastian Referendum Brexit.

Peningkatan dari 800 perusahaan di tahun 2016 menjadi 842 perusahaan di tahun 2019 juga diiringi dengan keuntungan mencapai 48 miliar Poundsterling dan telah membuka lahan pekerjaan bagi hampir 105.000 pekerja. Dari 842 perusahaan-perusahaan asal India yang berada di Inggris, 35% dari jumlah tersebut merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan telekomunikasi, seperti Infosys dan Reliance Jio. Sementara itu, 15% dari jumlah perusahaan India di Inggris bergerak di bidang farmasi, 13% di bidang

pelayanan bisnis dan 6% di bidang penjualan mesin dan pabrikan. Hal ini tentu disambut sangat baik oleh Menteri Investasi Inggris, Graham Stuart.

"We will always welcome Indian investments and we recognize India's importance as one of our most critical bilateral investors" kata Menteri Investasi Inggris, Graham Stuart, dilansir oleh *Economic Times*.

Anuj Chande, kepala bidang Grup Asia Selatan dari perusahaan konsultasi bisnis Grant Thornton UK LLP, menjelaskan bahwa peningkatan jumlah investasi perusahaan-perusahaan India di Inggris dari 800 perusahaan di tahun 2016 menjadi 842 perusahaan di tahun 2019 tentu dipengaruhi oleh kebijakan penurunan pajak bagi perusahaan asing, atau yang dikenal dengan kebijakan *Super-Competitive Economy*. Lakshmi Kaul, kepala perwakilan UK Chartered Insurance Institute menambahkan:

"As India's economy continues to grow, Indian companies will increasingly have greater choice over where to invest and the UK must ensure that, beyond Brexit, it remains a leading investment destination"

5. KESIMPULAN

Dalam kegiatan investasi, adanya Referendum Brexit tentu akan memberikan ketidakpastian bagi para investor asing, utamanya investor yang berasal dari India dan memiliki perusahaan-perusahaan besar di Inggris. Ketidakpastian dari Referendum Brexit tentu akan mempengaruhi mereka untuk memindahkan investasi di Inggris menuju negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya. *Economic Times* mengeluarkan

data bahwa perusahaan-perusahaan asal India yang berinvestasi di Inggris mengalami peningkatan dari 800 perusahaan di tahun 2016 atau sebelum terjadinya Referendum Brexit, menjadi 842 perusahaan di tahun 2019. Peningkatan ini tetap terjadi meskipun tetap adanya isu-isu mengenai ketidakpastian Referendum Brexit.

Peningkatan jumlah investasi dari perusahaan-perusahaan besar India menuju Inggris tidak lepas dari peran serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris, utamanya kebijakan-kebijakan yang mengarah ke perekonomian dan investasi asing. Kebijakan-kebijakan ini tentu diperlukan agar investasi asing, utamanya yang berasal dari India, setidaknya tetap atau bahkan bisa meningkat jumlahnya dibandingkan dengan sebelum terjadinya Referendum Brexit.

Kebijakan yang pertama adalah Kebijakan *Super-Competitive Economy*, dijelaskan secara lebih lanjut oleh Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, merupakan sebuah kebijakan yang akan memotong pajak-pajak perusahaan asing di Inggris menjadi kurang dari 15%, dari angka pajak 20% sebelum terjadinya Referendum Brexit. Hal ini akan menjadikan Inggris sebagai negara dengan pajak perusahaan asing terendah di seluruh dunia. Kembali melihat pada konsep *Economic Statecraft*, pemberlakuan kebijakan *Super-Competitive Economy* dari pemerintah Inggris dan merupakan sebuah kebijakan yang akan memotong pajak-pajak perusahaan asing di Inggris menjadi kurang dari 15%, dari angka pajak 20% sebelum terjadinya Referendum Brexit, merupakan realisasi dari instrumen

Positive Economic Statecraft, poin ketiga yaitu pemberlakuan peraturan mengenai pajak yang ringan dan melalui proses yang tidak berbelit-belit.

Kebijakan kedua yaitu kembali menggalakan pesona kota London sebagai destinasi utama bagi perusahaan-perusahaan besar yang ingin berinvestasi di Inggris. Dengan tajuk utama "*Welcome to London-Europe's Global Business City*" menunjukkan bahwa kota London menawarkan kesempatan terbaik bagi investasi-investasi asing yang ingin meraih kesuksesan dalam ranah internasional. Terkait kembali dengan konsep *Economic Statecraft*, utamanya instrumen-instrumen *Positive Economic Statecraft* yang dapat dijalankan oleh pemerintah Inggris guna mempertahankan, atau bahkan menambah jumlah investasi India di Inggris pasca Referendum Brexit, dapat tercermin dari kebijakan menjadikan London sebagai kota tujuan investasi asing. *Business-friendly Environment* mengimplementasikan instrumen mempermudah pemberian izin investasi, sedangkan *Investment and Innovation* mengimplementasikan instrument pemberian kepastian hukum atau garansi terhadap setiap investasi yang datang. Dengan beberapa kemudahan dalam implementasi instrumen-instrumen *Positive Economic Statecraft* yang ada dalam kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris, tentu dapat menjamin keberadaan investasi-investasi dari India agar tetap, atau malah semakin banyak berada di Inggris.

6. DAFTAR PUSTAKA

Adila, Raisa. 2016. *Brexit, Inggris Incar Peningkatan Kerjasama Ekonomi*

dengan India. Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2016/11/08/20/1536408/brexit-inggris-incar-peningkatan-kerjasama-ekonomi-dengan-india> (1 Mei 2018)

Balasubramanian, Sai. 2016. *The Impact of "Brexit" on India*. Diakses dari http://www.huffingtonpost.com/entry/the-impact-of-brexit-on-india-us_5771296ce4b0fa01a1405600 (1 September 2017)

Baldwin, David A. 2015. *Economic Statecraft*. Diakses dari <https://www.britannica.com/topic/economic-statecraft> (1 Maret 2019)

BBC Indonesia. 2016. *Pasca-Brexit, Inggris akan Potong Pajak Perusahaan menjadi Kurang Dari 15%*. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160704_dunia_inggris_pajak (14 Juli 2019)

Blitz, Roger. Lewis, Leo. 2016. *Pound Tumbles to 30-Year Low as Britain Votes Brexit*. Diakses dari <https://www.ft.com/content/8d8a100e-38c2-11e6-a780-b48ed7b6126f> (12 Juli 2019)

Canton, Naomi. 2016. *UK Well Placed to Expand Ties with India Post-Brexit*. Diakses dari <https://asiahouse.org/news-and-views/uk-well-placed-expand-ties-india-post-brexit-says-british-high-commissioner/> (27 Juli 2019)

Consultancy.in. 2019. *Indian Investment in the UK in only Growing despite the Brexit Saga*. Diakses dari <https://www.consultancy.in/news/2362/indian-investment-in-the-uk-is-only->

- [growing-despite-the-brex-it-saga](#) (1 Agustus 2019)
- Desai, Ronak D. 2016. *What Brexit Means for India*. Diakses dari <https://www.forbes.com/sites/ronakdesai/2016/07/06/what-brex-it-means-for-india/#45ad61815e74> (1 September 2017)
- Gross, Jenny. 2016. *Why is British Prime Minister Theresa May visiting India?*. Diakses dari <https://blogs.wsj.com/briefly/2016/11/06/why-is-british-prime-minister-theresa-may-visiting-india-the-short-answer/> (17 Agustus 2019)
- Gopal, Priyamvada. 2016. *Theresa May's India Trip Reveals Much About Who Will Matter In Post-Brexit Britain*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/08/theresa-may-india-trip-post-brex-it-britain> (17 Agustus 2019)
- Hartanto. 2016. *Referendum Brexit dan Kembali Mengemukakan Kedaulatan Negara serta Dampaknya bagi Dunia dan Indonesia*. Universitas Respati: Yogyakarta
- Hartono, Budi. 2015. *Konsep Power dalam Hubungan Internasional*. Universitas Pertahanan Indonesia: Bogor
- Havid, Mohamad. 2015. *Balance of Power*. Universitas Brawijaya: Malang
- India Inc. 2018. *Brexit or No Brexit, India on Investment Spree in the UK*. Diakses dari <https://indiaincgroup.com/brexit-or-no-brex-it-india-on-investment-spre-e-in-the-uk-india-global-business/> (17 Juli 2019)
- Jones, Walter S. 1993. *Logika Hubungan Internasional 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kumar, Hemanth. 2017. *Impact of Brexit on Tata Groups*. International Journal of Business from Bharatiya Vidya Bhavan's M. P. Birla Institute of Management: Bengaluru
- London & Partners. 2017. *Welcome to London – Europe's Global Business City*. Diakses dari <https://www.business.london/invest/why-london> (2 Agustus 2019)
- Mansbach, Richard W. Rafferty, Kirsten L. *Introduction to Global Politics*. Bandung: Nusa Media
- Mingst, Karen. 2003. *Essentials of International Relations: Second Edition*. London: Norton & Company
- Mishra, Lalatendu. 2015. *India Emerges as Third Largest FDI Source for UK*. Diakses dari <http://www.thehindu.com/business/india-emerges-as-third-largest-fdi-source-for-uk/article7347305.ece> (14 Februari 2018)
- VOA Indonesia. 2016. *PM Inggris Berkunjung ke India, Incar Perdagangan Pasca Brexit*. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/pm-inggris-berkunjung-ke-india-incar-perdagangan-pasca-brex-it/3584275.html> (17 Agustus 2019)